

BAB VII

REFLEKSI PROSES PEMBELAJARAN MASYARAKAT SUDIMORO

Problem sosial yang dialami masyarakat Desa Sudimoro merupakan problem yang terjadi sejak kurang lebih 5 tahun terakhir. Desa yang dalam data BPS Klaten sebagai salah satu desa swadaya ini merasa kurang mampu jika berurusan dengan pemerintah dan menyampaikan kritik atas pembangunan yang dirasakan selama ini. Padahal masyarakat Sudimoro merupakan masyarakat yang memiliki karakter ramah, terbuka, pekerja keras, dan menghargai kemajemukan. Terbukti di lapangan, oleh pemerintah bahwa masyarakat dianggap lemah dan tidak mampu memberikan sumbangsih untuk mendukung pembangunan desa (tanpa mengaitkan dengan dukungan masyarakat untuk pembagunan dalam bentuk materi atau uang). Di Desa Sudimoro, masyarakat mampu melakukan analisa, perencanaan, dan tindakan aksi untuk menyelesaikan problem mereka. Dengan pendekatan secara intensif, berinteraksi, dan berdiskusi bersama warga dapat dipahami mereka bukanlah orang-orang lemah. Perlu adanya pengorganisasian untuk memunculkan “kekuatan” mereka.

Sistem data basedesa yang kurang valid merupakan permasalahan yang terjadi di Desa Sudimoro yang telah banyak dikeluhkan oleh warga, namun mereka hanya diam. Sementara pemerintah pusat atau BPS kurang mengetahui kondisi yang terjadi

di masyarakat. Di antara program pembangunan seperti BLT (BLSM), bantuan raskin, dan jamkesmas menimbulkan kecemburuan sosial pada tubuh masyarakat terlepas dari apa yang sebenarnya diharapkan pemerintah. Namun, konsep pembangunan yang mengukur kondisi kesejahteraan hanya dari sisi ekonomi ini perlu dicermati. Pembangunan seharusnya mengembangkan suatu kondisi dari kurang baik menjadi baik yang dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia, pada wilayah makro, tentu melakukan banyak cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, konsep atau paradigma pembangunan Indonesia yang masih dibayangkan oleh konsep *top-down*, pelaksanaan pembangunan memang dirasakan manfaatnya oleh rakyat namun dapat berimbas kurang baik terhadap rakyatnya. Penyaluran dana bantuan seperti BLT (BLSM), raskin, dan jamkesmas, di satu sisi memang cukup membantu warga yang benar-benar kesulitan ekonomi, terutama orang renta tanpa keluarga (anak atau cucu). Banyak warga Sudimoro yang mengeluhkan jika pemerintah ingin membantu warga miskin mengapa malah beberapa warga kaya yang mendapat bantuan?. Pertanyaan seperti ini sering muncul di masyarakat, terutama pada kaum *grass root*. Penyaluran dana bantuan sebaiknya didasarkan pada aset base atau sumber daya lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan demi pembangunan yang menyejahterakan kehidupan mereka.

Dengan dilakukannya pemetaan sosial dan spasial di Desa Sudimoro, maka sebagai tahap awal data-data yang telah dikumpulkan oleh 10 orang tim lokal desa

Sudimoro, dapat ditindak lanjuti untuk bahan analisa pemerintah sebagai bahan pengambilan keputusan untuk merencanakan pembangunan sampai pelaksanaannya. Aksi yang dilakukan oleh kesepuluh orang sebagai tim lokal ini sungguh luar biasa. Mereka harus memasuki tiap rumah untuk mendata rumah tangga. Pendataan ini menghasilkan sebuah data-data penduduk Sudimoro yang berjumlah 883 KK, di mana pendataan dilakukan selama hampir dua bulan (tidak berturut-turut). Alasan pemerintah terkait penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran adalah terbatasnya dana untuk melakukan survey rumah tangga atau pendataan penduduk secara *up to date*, minimnya tenaga survey, dan waktu yang lama sehingga data yang dimiliki adalah data tahun 2008 yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ekonomi rumah tangga penduduk. Dengan mengorganisir masyarakat untuk riset dan aksi, mematahkan pandangan konsep pembangunan di Indonesia yang *top-down*. Dengan mengelola data base berbasis masyarakat, masyarakat akan merasa dihargai kemampuannya dan diakui pengetahuannya tentang kejadian, kondisi, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pada problem di Desa Sudimoro ini, masyarakat dipandang bodoh dan tidak memiliki kemampuan. Padahal sebenarnya masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang luar biasa, jika dikembangkan dapat mengatasi persoalan-persolan yang mereka hadapi. Dengan memberdayakan masyarakat secara partisipatif, melakukan perencanaan bersama masyarakat Sudimoro, menyusun strategi penyelesaian masalah, dan melakukan tindakan aksi, jika hal ini dilakukan di banyak tempat lain, kemungkinan besar masyarakat dapat mandiri tanpa harus tergantung pada negara,

mengharapkan bantuan-bantuan datang pada mereka atau bahkan kericuhan terkait penyaluran BLT (BLSM) atau raskin dapat diminimalisir.

Dengan merubah cara pandang tentang kehidupan masyarakat Sudimoro melalui pengorganisasian untuk membangun partisipasi, bahwa merekapun mampu melakukan riset bersama dan melakukan perubahan menuju pribadi atau komunitas yang berdaya dengan memaksimalkan segala potensi dan tetap menghormati nilai-nilai lokal yang diyakini, akan mampu mewujudkan desa yang maju serta arif. Merubah cara pandang masyarakat Sudimoro adalah melalui peningkatan kesadaran bahwa segala hal terkait hidup mereka berpengaruh terhadap kualitas kesejahteraannya. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah serta adanya masalah penyaluran dana bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak menyelesaikan substansi masalah yang sebenarnya dihadapi warga, menunjukkan adanya perhatian pemerintah yang seolah memandang bahwa masyarakat desa itu lemah, tidak memiliki daya potensi, dan tidak memiliki pengetahuan yang bisa mengangkat harkat dan martabat hidupnya. Masyarakat selama ini hanya menerima penindasan sebagai hal yang “normal” atau “tidak bisa dihindari”. Mereka menyampaikan keluhan lewat obrolan bersama anggota komunitas dalam lingkup kecil. Bahwa permasalahan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah tersebut mengapa harus terjadi. Mereka meyakini bahwa hal itu tidak benar, tetapi mereka tidak mampu melakukan apapun untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk aparatur desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa Sudimoro. Maka dengan membangun partisipasi masyarakat akan mampu menciptakan

kepercayaan diri bahwa mereka tidak lemah dan mampu memberikan sumbangsih besar terhadap pemerintah seperti melakukan pemetaan sosial dan spasial guna mendukung program pembangunan negara khususnya di wilayah Sudimoro. Sentuhan pengorganisasian dan riset kritis yang dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat memiliki sedikit fakta nyata akan keberhasilan perubahan. Sebanyak 883 KK mengenai kondisi belanja rumah tangga di Desa Sudimoro telah terdata oleh kesepuluh tim lokal menggunakan form survey. Pada Pebruari 2014, data tersebut akan digunakan oleh pemerintah Desa Sudimoro untuk menyusun laporan kepada Pemerintah Kecamatan Tulung terkait data warga miskin, kondisi ekonomi atau usaha masyarakat, kondisi peternakan, kesehatan lingkungan, dan kondisi kesehatan masyarakat terkait program PKK Desa Sudimoro dan PNPM Mandiri.

Sampai saat ini, data yang terkumpul di tim lokal masing-masing dusun telah dikroscek dan pada bulan Desember 2013, telah diketahui mengenai data pemilik ternak (kambing atau sapi), data kepemilikan usaha rumah tangga (toko/warung/home industri), data rumah-rumah kosong di 16 RT terkait upaya verifikasi data daftar pemilu atau pilkada tahun 2009 yang memiliki banyak kejanggalan, yang mana nama pemilik rumah kosong tersebut tetap dimasukkan dalam daftar pemilih tetap pemilu atau pilkada. Padahal pemilik rumah tersebut telah pindah ke luar daerah (Jakarta/Bandung), kemudian data kepemilikan WC di masing-masing rumah (data ini pada akhir Desember 2013 diserahkan oleh PKK Desa Sudimoro ke Pemerintah Kecamatan Tulung terkait Program PNPM mandiri pedesaan untuk mendata usaha-usaha masyarakat di Desa Sudimoro).

Proses pengorganisasian dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pengorganisasian di wilayah Dusun I (RT 11-16) pada bulan Juni sampai dengan Juli 2013 dan tahap kedua, pengorganisasian di wilayah Dusun II dan III (RT 1-10) pada akhir Oktober sampai dengan Desember 2013. Pengorganisasian menjadi dua tahap dikarenakan wilayah Dusun I dan Dusun II serta Dusun III berbeda, baik karakter masyarakatnya maupun tingkat partisipasinya. Di Dusun II dan III memerlukan pendekatan yang lebih lama dan intens. Dalam proses pengorganisasian di tiga dusun, partisipasi masyarakat adalah hal yang utama. Maka, untuk mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat tidak hanya dari segi kuantitasnya saja tetapi juga kualitasnya, diperlukan strategi atau sebuah cara agar permasalahan utama yaitu belum adanya sistem database yang tidak valid dapat dipecahkan.

Salah satu pertimbangan agar menumbuhkan partisipasi masyarakat Sudimoro yang berkualitas adalah melalui lembaga lokal yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat¹⁴⁷ atau menurut Goldsmith dan Blustain, melalui organisasi yang sudah dikenal atau ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan¹⁴⁸. Dalam hal ini, bersama dengan Karang Taruna, kelompok tani, dan PKK Desa Sudimoro. Partisipasi masyarakat Sudimoro dalam pemetaan tahap I dan II, wilayah Dusun I dan Dusun II serta Dusun III, tidak hanya terlihat pada saat perkumpulan untuk diskusi semata, tetapi juga dapat dilihat mulai tahap perencanaan (diskusi bersama Karang Taruna Jembatan dan Wajong Wetan, diskusi dengan ibu-

¹⁴⁷ Sumarmi, *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan....*, hal 162

¹⁴⁸ *Ibid*, hal. 164

ibu PKK, diskusi bersama warga dan ketua RW, diskusi dengan masyarakat dalam suasana informal bersama kelompok tani, warga, perangkat desa), tahap pelaksanaan (pemetaan: berkeliling penempelan ID rumah, memotret rumah, menggambar sket rumah, dan pencatatan nama KK, serta wawancara yang dilakukan tim lokal dari rumah ke rumah menggunakan form pendataan mengenai belanja rumah tangga per kepala keluarga), dan tahap pemanfaatan hasil (sebagai database desa untuk pengambilan kebijakan program pembangunan Desa Sudimoro). Terbentuknya tim lokal pemetaan sosial dan spasial terdiri dari berbagai unsur, yaitu warga (Sumarno, Sutopo, Purwaningsih dan Lestari), pemuda pemudi (Vebri dan Lilis), karang taruna (Haryono), tetapi Haryono tidak tergabung dalam tim lokal tetapi secara terpisah berkenan untuk membantu ketua RT 15 yaitu Juwakir dan Sumarno dalam lingkup Dusun I, PKK (Winarni), Ketua RT (Juwakir, Slamet dan Sauji). Pemetaan awal seperti penempelan ID, pencatatan nama KK, dan foto rumah dilakukan bersama Ketua RT, Ketua RW, karang taruna, warga, dan PKK didampingi peneliti. Selanjutnya pendataan atau wawancara menggunakan form survey dilakukan oleh tim lokal sendiri. Warga yang terlibat dalam pemetaan awal pun ada yang menjadi tim lokal, yaitu Juwakir, Sumarno, Slamet, Lilis, Sauji, dan Lestari. Sementara Winarni melakukan pemetaan awal dan pendataan tanpa peneliti.